

BAB 1

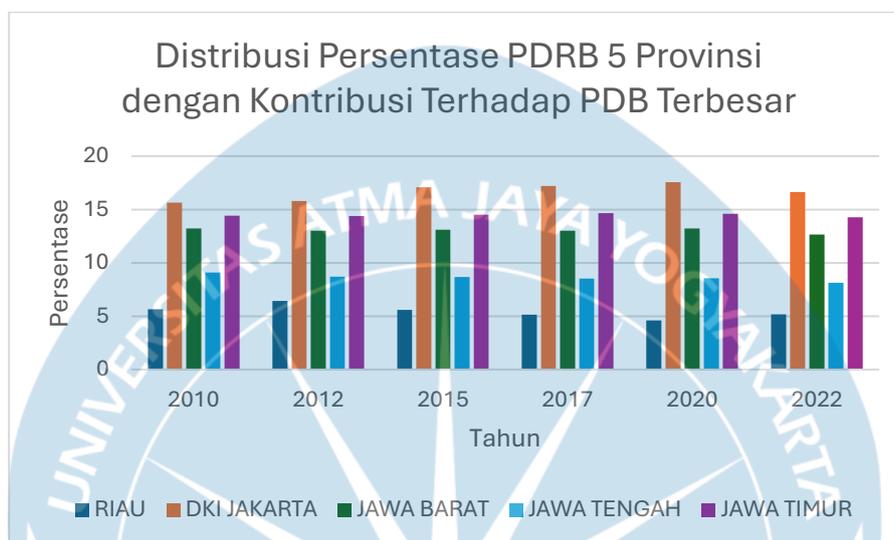
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keadaan ekonomi memiliki dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ketika kondisi ekonomi menguntungkan, maka akan lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahtraannya. Untuk mencapai tujuan ini, sangat penting untuk terlibat dalam perencanaan yang cermat dan pengembangan pendekatan strategis yang terstruktur dengan baik. Ketergantungan ekonomi antar daerah dengan potensi ekonominya merupakan fenomena yang sudah mapan, karena ciri khas masing-masing daerah berkontribusi pada variasi karakteristik ekonomi. Pencapaian pembangunan ekonomi sangat bergantung pada pelaksanaan strategi pembangunan yang disertai dengan upaya yang ditujukan untuk menghasilkan prospek lapangan kerja yang optimal.

Peningkatan perekonomian suatu daerah dapat mencakup berbagai sektor dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, sangat penting untuk membangun kolaborasi dan koordinasi yang efisien di antara semua pemangku kepentingan terkait (Nurlina *et al*, 2019). Prioritas pembangunan ekonomi di daerah harus dianggap sebagai hal yang penting, tidak hanya untuk pemerintah daerah, tetapi juga untuk pemerintah pusat. Daerah otonom baru akan menghadapi tantangan seperti bagaimana meningkatkan pendapatan daerah dan kemandirian dalam pembangunan terlepas dari segala batas wilayah dan ketersediaan sumber daya.

Berdasarkan Distribusi Persentase PDRB 5 Provinsi dengan kontribusi terhadap PDB terbesar di Indonesia, Provinsi Riau menempati urutan kelima.



Sumber: BPS (data diolah)

Gambar 1. 1

Distribusi Persentase PDRB 5 Provinsi dengan Kontribusi Terhadap PDB Terbesar

Berdasarkan Gambar 1.1 pada tahun 2022, terlihat bahwa provinsi pertama yang memiliki persentase PDRB dalam kontribusi terhadap PDB Indonesia yang paling besar adalah DKI Jakarta (16.64%), yang disusul oleh Jawa Timur (14.26%), Jawa Barat (12.65%), Jawa Tengah (8.15%) dan terakhir yaitu Provinsi Riau (5.18%).

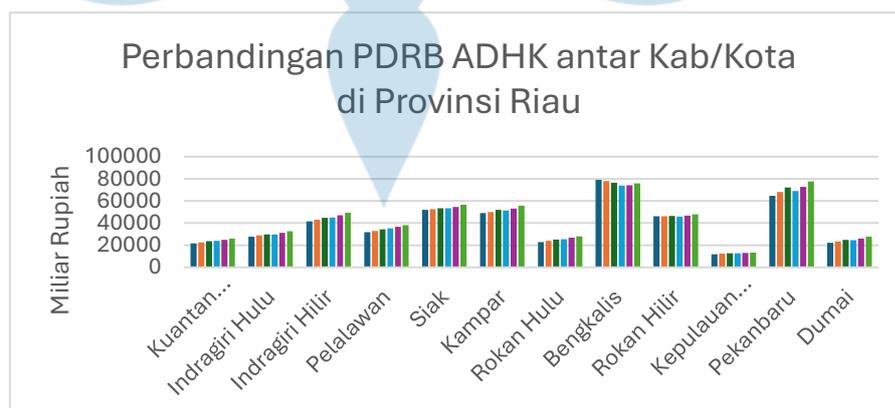
Alhempri *et al* (2014) Riau telah menjadi penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tertinggi kelima sejak tahun 2009. Riau merupakan provinsi yang memiliki sumber daya pertanian yang melimpah, termasuk minyak dan gas serta hasil perkebunan seperti kelapa sawit, nanas, kelapa, dan

karet.

Hamidi et al (2011) mengemukakan bahwa adanya keunggulan komparatif di Provinsi Riau dengan alasan letak yang strategis. Pertama, letak Riau dekat dengan negara-negara ASEAN, seperti Singapore, Malaysia dan Thailand yang merupakan salah satu pusat perdagangan dunia. Kedua, Riau berada di rute perdagangan dan pelayaran internasional di Asia-Pasifik. Ketiga, dengan letaknya yang berada di tengah Pulau Sumatera, sehingga dilewati oleh lintas barat dan lintas timur.

Provinsi Riau terdiri dari 10 kabupaten dan 2 kota yaitu Kabupaten Bengkalis; Indragiri Hilir; Indragiri Hulu; Kampar; Kep. Meranti; Kuantan Singigi; Pelalawan; Rokan Hilir; Rokan Hulu; Siak; Kota Dumai dan Kota Pekanbaru.

Pada Gambar 1.2 dapat dilihat mengenai perbandingan PDRB antar daerah kota dan kabupaten.



Gambar 1. 2

Perbandingan PDRB antar Kab/Kota di Provinsi Riau tahun 2017 - 2022

Sumber: BPS (data diolah)

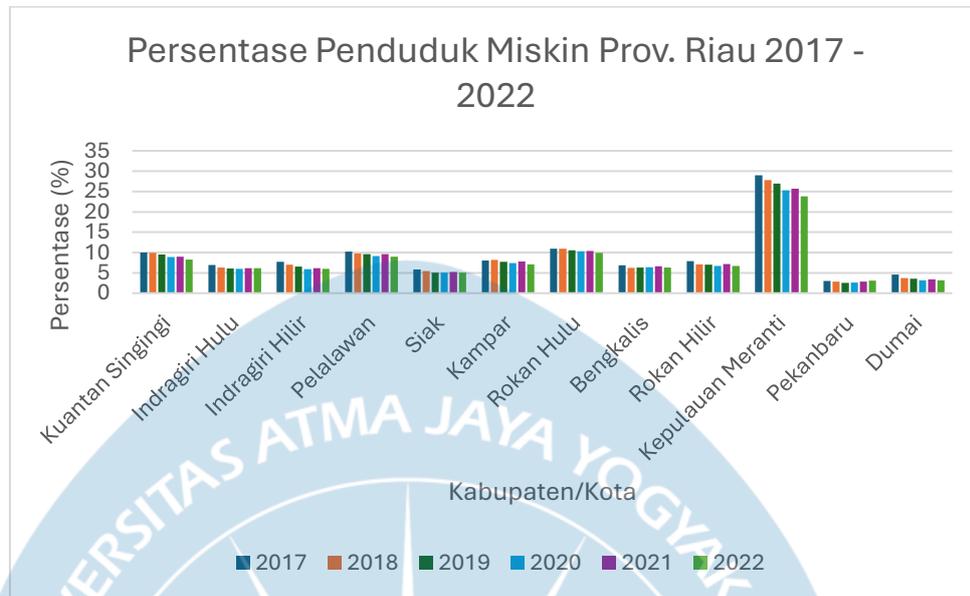
Berdasarkan Gambar 1.2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2022, PDRB Pekanbaru (Rp77.539,1 miliar) merupakan PDRB tertinggi dan cenderung meningkat jika dibandingkan dengan PDRB Kabupaten lainnya. PDRB Kab. Bengkalis (Rp75.878,58 miliar) menjadi ke-2 paling tinggi dengan pergerakan yang juga cenderung stabil, diikuti dengan PDRB Kab. Siak (Rp56.605,99 miliar), PDRB Kab. Kampar (Rp55.765,14 miliar) dan PDRB Kab. Kep. Meranti (Rp13.421,78 miliar) dan Kab. Rokan Hulu (Rp28.093,64 miliar) menjadi yang terendah. Berdasarkan data tersebut, walaupun banyak daerah yang memiliki tingkat ekonomi tinggi, namun kesejahteraan masyarakat belum meningkat secara merata dan signifikan. Didorong oleh PDB yang jauh lebih besar, fenomena ekonomi ini memperburuk ketimpangan kekayaan, dimana kelompok kaya mengalami akumulasi kekayaan lebih lanjut sementara kelompok miskin menghadapi kesulitan keuangan yang semakin parah. Hal ini menunjukkan adanya disparitas pendapatan. Jika ketimpangan pendapatan dibiarkan terus berlanjut, kemungkinan besar hal ini akan menimbulkan permasalahan lebih lanjut, yang ditandai dengan tingginya tingkat disparitas.

Oleh karena itu, jika ketimpangan ekonomi terus meningkat tanpa intervensi segera, hal ini akan menimbulkan banyak masalah, termasuk meningkatnya angka kemiskinan dan menurunnya standar kesejahteraan. Tingginya ketimpangan pendapatan antar daerah akan menyebabkan kemiskinan yang lebih sulit diatasi, sehingga masalah ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau cukup serius untuk diperhatikan.

Kemiskinan adalah masalah yang terus-menerus dan lazim terjadi di

Indonesia, dan hal ini secara konsisten diakui sebagai masalah utama oleh pemerintahan-pemerintahan berturut-turut sepanjang sejarah negara ini. Dari perspektif holistik, kemiskinan mencakup lebih dari sekedar kurangnya kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Hal ini juga mencakup terbatasnya kesempatan untuk pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, dan sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, provinsi yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi, kelapa sawit, dan gas belum tentu mampu mengentaskan kemiskinan di wilayah tersebut (Lenggogeni dan Iyan, 2012).

Nurjannah *et al* (2022) Provinsi Riau memiliki ciri kekayaan yang luar biasa dan dianggap unggul dibandingkan provinsi lain karena jumlah penduduknya yang relatif tinggi dan sumber daya alam (SDA) yang melimpah yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan. Meski demikian, permasalahan kemiskinan di Provinsi Riau masih terus berlanjut dan disertai dengan tingkat ketimpangan yang cukup besar.



Sumber: BPS Tahun 2017 – 2022 (data diolah)

Gambar 1.3

Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota di Provinsi Riau tahun 2017 - 2022

Pada Gambar 1.3 dapat diketahui bahwa persentase penduduk miskin berdasarkan Kabupaten/Kota di Prov. Riau, Kab. Kepulauan Meranti menjadi kabupaten dengan persentase penduduk miskin yang tertinggi di antara kabupaten dan kota lainnya dengan angka 23,84% pada tahun 2022 dan diikuti dengan Kab. Rokan Hulu sebesar 9,95% pada tahun 2022, Pelalawan (8,97%), Kuantan Singingi (8,24%), Kampar (7,12%), dan angka persentase penduduk miskin terendah adalah Kota Pekanbaru (3,06%).

Provinsi Riau mempunyai potensi sumber daya alam yang cukup besar, antara lain minyak dan gas (pertambangan), karet (perkebunan), kelapa sawit (perkebunan), pertanian, dan perikanan. Sektor-sektor ini merupakan sektor yang paling dominan walaupun mengalami beberapa perubahan. Selain

wilayah daratannya yang sangat luas, Provinsi Riau juga mempunyai wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang cukup besar. Luas wilayah Provinsi Riau adalah 89.936 km² dan jumlah penduduk sebanyak 6.743.099 jiwa menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil Provinsi Riau Tahun 2022. Namun angka tersebut belum cukup mewakili tingkat kekayaan di provinsi tersebut. Diduga, pemerintah dapat secara efektif mengatasi kemiskinan di Provinsi Riau mengingat tersedianya data mengenai potensi sumber daya alam. Namun pada kenyataannya, kemiskinan masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan.

Oleh karena itu, salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan menggali potensi yang beragam yang terdapat di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dan sektor yang menjadi potensi unggulan beserta keterkaitannya dengan ketimpangan kemiskinan yang terjadi. Jika potensi ini dimanfaatkan secara efektif, secara langsung akan menghasilkan keuntungan bagi Kabupaten tersebut dan akan mengurangi angka persentase penduduk miskin.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan pada tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimanakah hubungan jumlah sektor unggulan dan tingkat kemiskinan di wilayah Provinsi Riau?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan PDRB sektor unggulan di masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Riau terhadap tingkat kemiskinan secara keseluruhan di Provinsi Riau?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang akan diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hubungan antara jumlah sektor unggulan dan tingkat kemiskinan masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan PDRB sektor unggulan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari studi ini diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi:

- a) Bagi peneliti, tulisan ini dapat menambah wawasan mengenai sektor unggulan dan sektor basis di Provinsi Riau dan keterkaitannya dengan masalah kemiskinan.
- b) Bagi pemerintah, tulisan ini dapat dijadikan bahan acuan untuk pertimbangan pemerintah dalam penyusunan kebijakan mengenai sektor unggulan dan injeksi dana terhadap sektor tersebut.
- c) Bagi pembaca, tulisan ini dapat menambah wawasan dan dapat menjadi pedoman bagi peneliti lain yang ingin meneliti topik serupa.

1.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan proposisi atau dugaan yang belum terbukti (Zikmund *et al*, 2013). Dugaan tersebut masih bersifat tidak pasti dan akan dibuktikan melalui teknik analisis yang akan digunakan. Hipotesis dari penelitian ini adalah

1. Diduga jumlah sektor unggulan memiliki hubungan dengan tingkat kemiskinan.
2. Diduga pertumbuhan PDRB sektor unggulan memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi pendahuluan masalah, pengidentifikasian masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengulas studi sebelumnya yang terkait dengan konsep dan teori yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan sebagian dari metodologi penelitian yang menjelaskan proses penelitian yang dilakukan, jenis data yang digunakan seperti sumber data, alat analisis data, dan pendekatan yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab bagian ini, terdapat informasi mengenai hasil penelitian dan analisis terkait sektor unggulan serta potensi sektor unggulan di Provinsi Riau dan kaitannya dengan Kemiskinan.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini berfungsi sebagai penutup yang merangkum kesimpulan dari seluruh penelitian, membahas hasil analisis, dan memberikan saran berdasarkan kesimpulan yang telah dihasilkan.